



**RAPAT KERJA REGIONAL I
BKPRN TAHUN 2014**
halaman 2

SEMINAR IRSA 2014
halaman 2

**RESENSI BUKU:
PERENCANAAN TATA RUANG KAWASAN
STRATEGIS NASIONAL**
halaman 4

INDONESIA TERLETAK DI DAERAH KHATULISTIWA ... HAL 3

NEWSLETTER TATA RUANG PERTANAHAN

MEDIA INFORMASI BIDANG TATA RUANG DAN PERTANAHAN

EDISI 6/ JULI 2014

KILAS BALIK:

Dinamika Isu Tata Ruang dan Pertanian



Ilustrasi Ketahanan Pangan

ISU PERTANAHAN:

Visi misi kedua capres-cawapres sama-sama membawa Indonesia untuk berdaulat pangan. Agar bisa berdaulat pangan, pertama-tama petani sebagai pelaku utama harus berdaulat. Namun pada kenyataannya, kondisi petani saat ini masih memprihatinkan. Masih banyak petani yang memperoleh pendapatan di bawah garis kemiskinan. Hal ini diperparah dengan kepemilikan lahan yang tumpang tindih, sehingga lahan yang menjadi sumber pendapatan mereka menghilang dan dengan mudah dialihfungsikan. Pada Tahun 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjanji membagikan 8,15 juta hektar lahan untuk rakyat. Namun hal ini tidak juga dapat terealisasi, janji tinggal janji. *Land reform* dilakukan setelah UU Pokok Agraria (UU No 5/1960) disahkan bersamaan lahirnya UU No. 56 Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah

Pertanian. Secara ekonomi, yang ditopang program penunjang, seperti fasilitas kredit, penyuluhan, latihan, pendidikan, teknologi, pemasaran, manajemen dan infrastruktur, akan membuat rakyat lebih berdaya. Isu lain yang berkembang adalah maraknya sengketa lahan di beberapa tempat dan mengakibatkan beberapa warga terluka akibat konflik lahan yang terjadi.

Selain itu, Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat harus segera disahkan, sebagai upaya agar negara hadir di tengah masyarakat hukum adat. Kementerian Kehutanan didukung para pemangku kepentingan membuat terobosan kebijakan guna mempercepat sertifikasi kayu rakyat sebagai salah satu sumber bahan baku industri yang lestari. Pemilik hutan rakyat cukup membuat pernyataan kelestarian sumber bahan baku sendiri yang akan dievaluasi industri penampung secara periodik. Sertifikat kelestarian produk berbahan baku kayu membuka akses pasar lebih luas sehingga minat investasi hutan tanaman, terutama berbasis rakyat, meningkat.

ISU TATA RUANG:

Sistem transportasi umum yang terintegrasi menjadi salah satu isu di Bulan Juni 2014. Menurut Dr. Roland Busch, *CEO Infrastructure and Cities Sector*

Siemens, transportasi publik masa depan mau tidak mau memanfaatkan kemajuan teknologi. Kota-kota di dunia tidak lagi sekadar mengandalkan sistem transportasi berbasis jalan dan rel manual, bukan pula sekadar berbasis rel elektrik yang bisa bekerja secara otomatis, tetapi juga tersedianya model bangunan infrastruktur jalan dan rel yang terintegrasi secara canggih dan pintar dengan perangkat teknologi informasi.

Dengan meningkatnya laju demografi di kota metropolitan seperti Jakarta, maka beban kota untuk membangun transportasi publik yang baik akan semakin tinggi. Salah satu transportasi publik yang digagas oleh pemda DKI Jakarta adalah MRT (*Mass Rapid Transit*) yang saat ini tengah mulai dilakukan pembangunan fisik. Namun pembangunannya masih terkendala koordinasi antarlembaga. Sementara itu, arsitektur dan perencanaan kota menjadi wacana menarik dalam pembangunan kota di masa depan. Keduanya menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan.

Arsitektur menjadi bagian penting dalam perencanaan kota guna mendukung terciptanya wajah kota dan kenyamanan di dalamnya. Munculnya berbagai kota kreatif menjadi bukti bahwa arsitektur memiliki peranan yang sangat penting.

RAPAT KERJA REGIONAL I BKPRN TAHUN 2014

Penyelarasan Kebijakan Penataan Ruang Nasional dan Daerah



Sumber: Dokumentasi TRP

Bandung, (23/6), Penyelenggaraan Penataan Ruang menjadi salah satu bidang penting yang memberikan pengaruh ke berbagai sektor. Dalam pelaksanaannya banyak faktor yang menjadi perhatian, seperti kelembagaan dan isu konflik yang terjadi di daerah. Hal ini disampaikan pada Rapat Kerja Regional I Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional di Hotel *Green Universal*, Bandung.

Rapat kerja yang dibuka oleh Dirjen Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, DR. Muh. Marwan, M.Si, ini menghadirkan tiga narasumber, yaitu Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas, Imron Bulkin; Direktur Fasilitas Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri, Edi Sugiharto, SH, M.Si, dan Direktur Perkotaan,

Ditjen Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum, Dadang Rukmana.

Dalam rapat ini, pembahasan lebih detail dilakukan dalam Sidang Komisi I dan Sidang Komisi II. Pembahasan isu strategis pada Sidang Komisi didasarkan pada kesepakatan forum BKPRN sebelumnya yaitu Rakernas BKPRN 2013 dan Rakornas BKPRD 2014 serta beberapa usulan lainnya sehingga BKPRN dapat mendetailkan langkah tindak lanjut yang dibutuhkan terkait beberapa isu tersebut.

Pada rapat ini pula, diusulkan untuk menyusun Kepmen tentang pedoman integrasi RPJPD dan RPJMD dengan RTRW. Namun demikian dalam perintegrasiannya perlu berhati-hati karena RPJPD dan RPJMD bersifat non-spasial sementara RTRW bersifat spasial.

Integrasi RPJPD dan RPJMD dengan RTRW terkendala perihal periodisasi/ masa berlaku yang berbeda-beda. Untuk sementara waktu, periodisasi rencana tata ruang mengacu pada RPJMN.

Selain itu, dibahas pula mengenai penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota, penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K), pengintegrasian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ke dalam RTRW, dan percepatan penyelesaian penetapan Kawasan Strategis Nasional (KSN). Di masa mendatang diharapkan penyelenggaraan tata ruang dapat lebih optimal dan dapat diaplikasikan dengan baik di seluruh wilayah Indonesia, baik di setiap provinsi maupun kabupaten/kota. (ZH/OC/CP/CR/AY)

SEMINAR IRSA 2014

Sosialisasi Kajian *Background Study* RPJMN Bidang Tata Ruang dan Pertanahan

Dalam rangka berbagi hasil penelitian dan mendiskusikan topik terkini tentang aspek regional dari berbagai isu, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mengikuti konferensi *Indonesian Regional Science Association* (IRSA) ke-12 yang mengangkat tema "*Political Economy of Regional Development in Indonesia*," pada tanggal 2-3 Juni 2014 di Hotel Aryaduta, Makasar.

Konferensi ini merupakan acara tahunan IRSA yang menjadi tempat bagi para ilmuwan regional dan peneliti dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda dari Indonesia dan luar Indonesia untuk berbagi hasil penelitian dan berdiskusi tentang aspek regional. Pada konferensi IRSA ke-12 ini turut hadir pula

Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Sekretaris Kabinet, Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia, Universitas Sebelas Maret, dan Universitas Hasanuddin Makasar.

Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas hadir pada hari ke-2 dan secara paralel mempresentasikan dua makalah yaitu: (i) *Background Study of The National Medium Term Development Plan 2015-2019* oleh Kasubdit Pertanahan, Uke Mohammad Hussein, SSi., MPP; dan (ii) *Spatial Planning Policy: Third National Medium Term Development Plan's Background Study* oleh Aswicaksana ST, MT, MSc. (UK/IK/AS/TRP)



Sumber: Dokumentasi TRP

Tinjauan Kebencanaan dalam Perencanaan Tata Ruang



Ilustrasi Bencana Gunung Meletus (sumber photo: news.okezone.com)

Secara geografis Indonesia terletak di daerah khatulistiwa dengan morfologi yang beragam dari daratan hingga pegunungan tinggi. Keragaman morfologi ini banyak dipengaruhi oleh faktor geologi terutama dengan adanya aktivitas pergerakan lempeng tektonik aktif di sekitar perairan Indonesia diantaranya adalah lempeng Eurasia, Australia dan lempeng Dasar Samudera Pasifik. Pergerakan lempeng-lempeng tektonik tersebut menyebabkan terbentuknya jalur gempa bumi, rangkaian gunung api aktif serta patahan-patahan geologi yang merupakan zona rawan bencana gempa bumi dan tanah longsor. Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang memiliki potensi tinggi dalam hal kebencanaan.

Melalui berbagai pengalaman bencana yang pernah terjadi di Indonesia, seperti gempa bumi di Yogya, tsunami Aceh, meletusnya Gunung Sinabung, dan bencana lainnya, paradigma kebijakan dalam penanggulangan bencana nasional mengalami pergeseran pendekatan, yaitu dari responsif menjadi pencegahan, sektoral menjadi multi-sektoral, inisiatif pemerintah menjadi tanggung jawab bersama, sentralisasi menjadi desentralisasi, dan tanggap darurat menjadi pengurangan risiko bencana. Saat ini, beberapa isu strategis yang dihadapi dalam pengurangan risiko bencana, yakni bencana akibat faktor geologi, perubahan iklim global, bertambahnya degradasi lingkungan, dan pesatnya laju demografi.

Kebijakan, strategi, program, dan kegiatan dalam penanggulangan bencana telah diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) periode 2010 – 2014 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan. Arah kebijakan penanggulangan bencana pada RPJMN 2010 – 2014 ditekankan pada peningkatan pengurangan risiko bencana dan penguatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana.

Tata Ruang sebagai Alat Pengurangan Risiko Bencana

UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjadi acuan bagi upaya penanggulangan bencana di Indonesia. Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas tiga tahap, yang meliputi tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Penyelenggaraan untuk ketiga tahap tersebut harus dilakukan secara terintegrasi. Pada pasal 35 dan 36 mengamanatkan agar setiap daerah mempunyai perencanaan penanggulangan bencana yang menjadi acuan dalam upaya penanggulangan bencana.

Hyogo Framework for Action (Kerangka Aksi Hyogo), yang diputuskan pada Konferensi Pengurangan Risiko Bencana Dunia di Kobe pada tahun 2005, mengamanatkan perencanaan guna lahan (*land use planning*) atau perencanaan tata ruang sebagai salah satu alat untuk pengurangan risiko bencana. Peran perencanaan tata ruang dalam pengurangan risiko bencana telah banyak diusulkan dalam praktik perencanaan baik di negara-negara maju maupun negara-negara berkembang.

Perencanaan ruang (*spatial plan*) memiliki tujuan untuk menghasilkan penggunaan ruang yang efisien, termasuk di antaranya

meminimalisir risiko bencana. Indonesia sebagai negara yang sering mengalami bencana, baik karena faktor geografis atau peningkatan paparan (*exposure*) terhadap bencana karena pembangunan atau urbanisasi, memerlukan upaya-upaya untuk mengurangi besarnya risiko bencana.

Perencanaan tata ruang sebagai suatu bentuk intervensi pembangunan yang multidimensi memungkinkan berbagai bentuk kegiatan mitigasi risiko bencana untuk diintegrasikan, baik yang bersifat fisik (struktural) maupun non fisik (non struktural). Dalam menentukan bentuk kegiatan mitigasi yang akan digunakan akan bergantung kepada jenis bencana dan tujuan kegiatan tersebut.

Memasukkan upaya pengurangan risiko bencana ke dalam proses penataan ruang, yang meliputi proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, harus menjadi prioritas Pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan rentan, serta berpihak pada upaya pelestarian lingkungan hidup.

Mendorong perencanaan wilayah dan tata ruang yang peka terhadap bencana merupakan arahan kebijakan penanggulangan bencana dari RPJMN 2010 – 2014. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan percepatan pemulihan wilayah pasca bencana yang berbasis pengurangan risiko bencana.

(dari berbagai sumber)



LINK TERKAIT

Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan,
Bappenas
Portal Tata Ruang dan Pertanahan
Sekretariat BKPRN

Potret Kegiatan TRP

Rapat Kerja Regional I BKPRN Tahun
2014
Seminar IRSA 2014
Lokakarya Kajian Materi Teknis
SC-DRR

Lokakarya Kajian Materi Teknis SC-DRR

Pentingnya Satu Pedoman Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana



Sumber: Dokumentasi TRP

Melanjutkan rangkaian kegiatan dari *Focus Group Discussion* yang telah dilakukan sebelumnya di Jakarta, (10/6), Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Lokakarya dengan tema "Materi Teknis Revisi Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Berdasarkan Perspektif Pengurangan Risiko Bencana". Lokakarya yang dilakukan pada tanggal 30 Juni 2014 di Hotel Akmani ini bertujuan untuk

mendiseminasi materi teknis revisi pedoman penyusunan RTR berdasarkan perspektif PRB dan membangun komitmen perlunya pengarusutamaan PRB ke dalam RTR dan perumusan rencana tindak lanjut hasil kajian dan lokakarya.

Pada sambutannya, Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Ir. R. Aryawan Soetiarso Poetro, MSI, menjelaskan proyek *Safer Communities through Disaster Risk Reduction* (SC-DRR) di Kementerian PPN/Bappenas yang telah dimulai sejak tahun 2003. Proyek ini merupakan kerjasama antara UNDP, BNPB, dan Kementerian PPN/Bappenas. Aryawan memaparkan pula bahwa proyek SC-DRR ini dilakukan oleh dua Direktorat di Kementerian PPN/Bappenas, yakni Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal dan Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan.

Pada lokakarya ini, Gita Chandrika selaku tenaga ahli kajian dari SC-DRR, menyampaikan Materi teknis yang meliputi: 1) kedudukan materi teknis; 2) integrasi dokumen/proses

dalam pengarusutamaan pengurangan risiko bencana ke dalam RTRW Provinsi dan RTR KSN; 3) koordinasi kelembagaan; 4) keterkaitan KLHS dan kajian risiko bencana dalam rencana tata ruang; dan 5) penyepakatan rencana tindak lanjut. Hadir pula Eka Aurihan, Kasubdit Pengaturan Dit. Binda II Kementerian PU, yang menjelaskan standar Perencanaan Tata Ruang di Kawasan Rawan Bencana yang tengah dalam proses penyempurnaan, Ridwan dari BNPB, dan Tavip dari Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri, menjelaskan penguatan kelembagaan.

Secara umum, baik K/L maupun pemerintah daerah mendukung pengarusutamaan PRB ke dalam RTR, namun harus dimuat ke dalam 1 (satu) pedoman saja. Mengingat selain kajian ini, Kementerian Pekerjaan Umum sudah membuat *legal drafting* penyusunan RTR di kawasan rawan bencana, dan Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan Badan Geologi sedang menyusun pedoman serupa untuk penerapannya ke daerah. (GP/AY)

RESENSI BUKU:

Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional

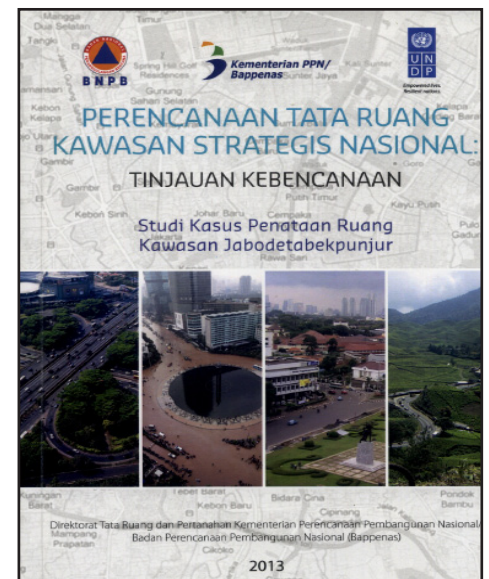
Tinjauan Kebencanaan:

Studi Kasus Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur

Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah memasukkan substansi tata ruang sebagai salah satu komponen penting yang membutuhkan perhatian. Selain itu, dalam UU Nomor 26 Tahun 2007, telah diamanatkan pula tentang penataan ruang

yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan. Kawasan Strategis Nasional (KSN) ialah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan. Hal ini karena secara nasional KSN berpengaruh sangat penting terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah di dalamnya yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Di dalam PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), ditetapkan 76 KSN yang memiliki kepentingan ekonomi, lingkungan hidup, sosial budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi, serta pertahanan dan keamanan. Namun

hingga saat ini baru tersusun 5 (lima) PP terkait dengan KSN, yaitu Sarbagita, Mamminasata, Mebidangro, BBK, dan Jabodetabekpunjur. Buku ini memuat hasil kajian Kementerian PPN/Bappenas dalam menguji coba kehandalan RTR KSN sebagai instrumen mitigasi bencana. KSN yang diambil sebagai objek pengujian adalah KSN Jabodetabekpunjur. Tujuan utama kajian adalah untuk menyediakan perspektif mitigasi bencana pada KSN Jabodetabekpunjur sehingga dapat tergambarkan tingkat risiko bencana dan dapat dirumuskan rekomendasi strategi manajemen risiko dengan perspektif mitigasi bencana.



Judul Buku:

Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategi Nasional

Penyusun: Bappenas dan SC-DRR Phase II

Penerbit : Bappenas dan SC-DRR Phase II

Jumlah halaman: 212

Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi kami:

DIREKTORAT TATA RUANG DAN
PERTANAHAN,
BAPPENAS

Jalan Taman Suropati No. 2A
Gedung Madiun Lt. 3

T : 021 392 7412

F : 021 392 6601

E : trp@bappenas.go.id

W : www.trp.or.id



TRP

Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Penanggung Jawab : Direktur Tata Ruang dan Pertanahan

Tim Redaksi: Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan

Editor : Astri, Gina, Santi

Layout: Indra dan Astri